

Perspektif Pekerja terhadap Hutan Tanaman Industri di Indonesia

By

Rulita Wijayaningdyah

Federation of All-Indonesian Wood Forestry and General Workers
Unions (KAHUTINDO)

Presented at

The Forests Dialogue

Pekanbaru, 7 March 2007

06.03.2007

Panduan FAO untuk Pengelolaan HTI yang Bertanggung Jawab

- Masalah potensial
 - Pekerja tanpa keterampilan/Upah rendah
 - Perputaran pekerja yang tinggi/Pekerjaan yang berbahaya
 - Pekerja kontrak secara ekstensif
 - Degradasi Perlindungan sosial
 - Pekerjaan mengejar target borongan
 - Jam kerja berlebihan
 - Kegiatan illegal

Panduan FAO untuk Pengelolaan HTI yang Bertanggung Jawab

- Solusi potensial
 - Penguatan ketenagakerjaan
 - Penguatan asosiasi/serikat pekerja
 - Pelaksanaan Standar Perburuhan Internasional secara tegas
- Pelatihan Stakeholder oleh Stakeholder
 - LSM melatih LSM
 - Organisasi Pekerja (Serikat pekerja) melatih pekerja

Apakah Hutan Tanaman di Indonesia secara sosial *sustainable*?

Pengolahan

Tenaga Kerja

Cut N Run
(*tebang lalu
kabur*)



Hire N Fire
(*peras lalu
buang*)

Hampir 80% tenaga kerja di Hutan Tanaman di-outsource/subkontrak

Atas nama **“Pengangguran”**, pekerja tidak memiliki:

- Kontrak Kerja yang baik (Individu dan Kolektif)
- Perlindungan tenaga kerja
- Pekerja dikontrak untuk 1-2 tahun saja: SUSTAINABLE?
- Perusahaan Utama TIDAK PEDULI

Perlindungan Hak Pekerja?

- Kebebasan berserikat
- Upah (Upah Minimum, pemotongan upah)
- Jam kerja (untuk buruh harian dan borongan, tidak ada upah lembur)
- Jaminan Sosial
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Pesangon dan Pensiun
- Tunjangan kesejahteraan (mis. Perumahan, tunjangan extra fooding, transportasi)
- Cuti (cuti sakit, cuti tahunan, cuti haid)
- Tunjangan keluarga (mis. Tunjangan pengobatan dan subsidi anak)
- Potensi terjadinya pekerja anak
- Pengembangan keterampilan
- Fee recruitment untuk menjadi buruh kontrak antara Rp. 500,000 – Rp. 2jt; fee akan dipotong dari upah

Situasi pengupahan Pekerja Kontrak

- Upah Minimum Propinsi Riau Rp 710,000/bulan
- Upah Minimum Kabupaten Pelalawan Rp 745,500/bulan
- Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Pekerja Lajang Riau Rp 1,2jt/bln
- Harga 25 kg beras Rp 125,000 (rata-rata Rp 5,000/kg)
- Pekerja Perempuan di Divisi Nursery mendapatkan upah Rp 28,500/hari (Rp 712,500/bln untuk 25 hari kerja)
- Pekerja penebangan di divis Harvesting (manual) mendapatkan upah Rp 36,000/hari (Rp 900,000/bln)
- **Tetapi harus dipotong untuk fee Labor Supplier;**
- **Prinsip Tak Kerja Tak Dapat Upah; jika absen karena sakit, upah dipotong**

Tenaga Kerja yang Berkelanjutan?

■ Industri Kehutanan yang Berkelanjutan?

- Pekerja yang diPHK berpotensi merusak hutan melalui penebangan liar (justifikasi: mereka sudah bermukim di sana dan memiliki pengalaman tebang, dan banyak menerima order dari cukong-cukong kayu)
- Rendahnya tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan hutan
- Pekerja fokus hanya ke aspek “kerja untuk upah” saja, tidak ada keterikatan pada tujuan perusahaan

Atau Kemiskinan Berkelanjutan?

- Tidak ada advokasi untuk meningkatkan standar kesejahteraan (iklim intimidasi terhadap serikat pekerja)
- Kurangnya upgrading pendidikan
- Kurangnya pengembangan keterampilan pekerja
- Pekerja tidak dapat merencanakan tunjangan hari tua/pensiun
- Upah dan kesejahteraan yang rendah, tidak ada investasi untuk masa depan

Pertanyaan Kesimpulan:

- Apakah masyarakat dapat didefinisikan secara sederhana penduduk yang hidup di sekitar konsesi dan bukan yang bekerja di dalam konsesi dan terkait dalam industri Hutan Tanaman?
- Untuk transfer teknologi/automatisasi, siapa yang mendapat manfaat dari meningkatnya produktivitas?
- Apa saja implikasi sosialnya jika investasi korporasi menggantikan peran investasi infrastruktur publik?